



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

Okto Irianto, dkk.

MENGGAGAS HALUAN MARITIM NASIONAL



Menggagas Haluan Maritim Nasional

PENULIS

Sarwono Kusumaatmadja
Tukul Rameyo Adi
Susilastuti Dwi Nugraha Jati
Darma Agung Setya Irfiansyah
Hendra Yusran Siry
Ludiro Madu
Lukmandono
Anang Siswanto

Nova Vincentia Pati
Sylvia Prisca Delima
Thomas Nugroho
Hotden Leonardo Nainggolan
Nikolaus Loy
Minto Basuki
Dian Inda Sari

BP No. 6834
No. KDT. 081
ISBN 978-602-260-461-7

Perancang Sampul
Aly Ibnu Husein

xii + 298 hlm.
16 × 24 cm

Diterbitkan oleh
Penerbitan dan Percetakan
Balai Pustaka

Jalan Bunga No. 8-8A
Matraman, Jakarta 13140
Tel. (6221) 8583369,
Faks. (6221) 29622129
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

Editor
Okto Irianto
Venda Yolanda Pical
Alfonsina Marthina Tapotubun

Cetakan Pertama: Desember 2021
©Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Penyelaras Bahasa
Febi Dasa Anggraini
Mirza Ahmad Heviko

Penata Letak
Ratih Rahayu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SAMBUTAN

Buku ini merupakan kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan beberapa penulis yang terdiri dari negarawan, pemerhati kebijakan, serta para dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah bekerja sama sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Menurut saya pendekatan buku ini sangat baik karena para penulis yang beragam pada akhirnya berhasil memberikan perspektif yang relatif lengkap terhadap konsep Haluan Maritim Nasional yang sedang kami gagas. Merupakan keinginan kami agar konsep Haluan Maritim Nasional ini dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia jangka panjang agar tercipta Indonesia Emas yang kita cita-citakan di tahun 2045.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Balai Pustaka yang menerbitkan buku ini. Balai Pustaka selaku penerbit yang memiliki sejarah panjang ternyata mendukung penuh usaha kami untuk meningkatkan literasi kemaritiman. Saya sangat mengapresiasi hal ini. Mudah-mudahan kerja sama penerbitan buku ini merupakan kerja sama pertama yang akan dilanjutkan di masa-masa yang akan datang.

Desember 2021

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagaimana besar wilayah Indonesia adalah perairan. Oleh karena itu, Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara maritim.

Meskipun negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun pemanfaatan sumber daya maritim yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengelola potensi, khususnya bidang kelautan ini.

Selain itu, dengan potensi sumber daya maritim yang dimiliki, Pemerintah Indonesia berharap menjadi poros maritim dunia. Cita-cita ini mengacu kepada Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Melalui KKI ini, Pemerintah menyadari masih terdapat kendala atau permasalahan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim diperlukan kajian dan masukan dari berbagai kalangan, khususnya para pakar di bidang kelautan dan kemaritiman. Selain itu, harus pula dibuat landasan atau acuan dalam menyusun strategi agar cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dapat terwujud.

Buku *Menggagas Haluan Maritim Nasional* ini berisi kajian dari 14 penulis terkait kemaritiman Indonesia. Semoga dengan hadirnya buku *Menggagas Haluan Maritim Nasional* ini cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa diwujudkan. Selain itu, potensi sumber daya maritim Indonesia bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Semoga cita-cita mulia ini terwujud.

Balai Pustaka

PENGANTAR EDITOR

Presiden Jokowi kembali menyinggung keinginan kolektif bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2021. Presiden menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu Presiden Jokowi menginginkan agar ekonomi biru Indonesia semakin diperkuat yang ditunjukkan dari kerja nyata, mulai dari meningkatkan konektivitas laut dan keamanan maritim dengan tujuan agar dapat melindungi kepentingan rakyat serta menumbuhkan ekonomi yang merata.

Selama lebih kurang tujuh tahun terakhir ini strategi untuk mencapai cita-cita poros maritim dunia, seperti yang disinggung presiden di atas, mengacu kepada Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang disusun untuk dilaksanakan setiap lima tahun. Dalam dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia I, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tercantum visi bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaan KKI selama ini, Pemerintah menyadari dua hal. Pertama adalah terdapat kesulitan dalam mendefinisikan acuan dan strategi yang efektif dan efisien atas kebijakan kemaritiman Indonesia yang sangat luas apabila target pencapaiannya adalah dalam jangka waktu 5 tahunan. Hal kedua adalah kesadaran bahwa isu kemaritiman merupakan isu jangka panjang yang membutuhkan konsistensi implementasi walaupun terdapat pergantian pemerintahan. Pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan suatu peta jalan atau tepatnya suatu haluan kebijakan kemaritiman jangka panjang. Untuk itu pemerintah saat ini sedang menyusun rencana kebijakan kemaritiman jangka panjang tersebut yang diberi nama Haluan Maritim Nasional. Diharapkan konsep Haluan Maritim Nasional ini dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2024--2045.

Konsep Haluan Maritim Nasional harus diformulasi dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masa kini dan perkembangan di masa yang akan datang sehingga mampu tercipta sintesis yang baik dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya. Konsep Haluan Maritim Nasional harus dikenalkan kepada seluruh komponen bangsa, baik dari dalam maupun luar pemerintahan, sehingga akan tercipta rasa memiliki bersama. Selain itu, hal yang lebih penting lagi adalah perlunya keterbukaan pemerintah dalam menerima dan menyaring masukan dari seluruh pihak terkait agar terbangun suatu konsep yang menyeluruh, efektif, dan membumi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam menerima dan menyaring masukan di atas adalah dengan mengundang kalangan akademisi, pemerhati, serta praktisi kebijakan untuk menuangkan konsep pemikiran kebijakan kemaritiman melalui suatu kumpulan tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan ini kemudian disatukan dalam sebuah buku dan diterbitkan oleh suatu penerbit nasional sehingga akan tersedia secara luas. Buku ini diharapkan dapat membahas semua komponen kebijakan kemaritiman, mulai dari kegigihan diplomasi, kekokohan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dinamika sosial kemasyarakatan, maupun geliat budaya.

Terdapat 14 tulisan yang berhasil dikumpulkan dalam buku ini. Dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai gagasan Haluan Maritim Nasional, maka tulisan tersebut disusun dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut: 1. Budaya maritim dan sejarah gagasan kemaritiman Indonesia; 2. Lingkungan strategis, pertahanan dan keamanan, serta diplomasi kemaritiman; 3. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 4. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan; dan 5. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan.

Bagian pertama yang membahas budaya maritim dan sejarah gagasan kemaritiman Indonesia diwakili oleh tiga buah tulisan. Tulisan pertama menjadi pengantar ke arah konsep Haluan Maritim Nasional yang sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Untuk itu Sarwono Kusumaatmadja, penulis paling senior dalam buku ini yang pernah menjabat sebagai Menteri Eksplorasi Laut/Kelautan Perikanan 1999--2001, merupakan narasumber yang sangat kredibel untuk mengantar pembaca ke dalam wacana kemaritiman dalam pemerintahan Indonesia

modern. Melalui tulisan berjudul “Menggenapkan Haluan Maritim Nasional”, Sarwono Kusumaatmadja menguraikan perjalanan konsep Wawasan Nusantara sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang telah melintasi perjalanan panjang berbagai pemerintahan selama ini. Tulisan ini mengingatkan bahwa kegigihan tersebut harus “digenapkan” melalui rumusan Haluan Maritim Nasional sebagai bagian RPJP 2024--2045 sehingga konsep tersebut harus dirumuskan dengan visi jangka panjang melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tulisan di atas kemudian diikuti oleh Tukul Rameyo Adi yang menjabarkan pengembangan budaya kemaritiman Indonesia melalui tulisan yang berjudul “Bangkit Budaya Bahari: Peningkatan Literasi Kebaharian dalam Kerangka Haluan Maritim 2024. Memulangkan Sirih ke Gagangnya, Pinang ke Tampuknya”. Literasi bahari, dalam pandangan penulis, berkaitan dengan tingkat minat, pemahaman atau kemampuan anak bangsa memahami laut dan kelautan termasuk budaya di dalamnya, yang saat ini harus diakui berada dalam tingkat yang amat rendah. Tukul Rameyo juga berpandangan bahwa menyiapkan generasi masa depan yang memiliki literasi bahari kuat tidak kalah pentingnya dengan menyiapkan haluan maritim itu sendiri. Literasi bahari mutlak diperlukan untuk membentuk ekosistem pembangunan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan kemaritiman sebagai salah satu haluannya.

Tulisan ketiga dalam bagian ini adalah “Media dan Promosi Budaya Maritim” oleh Susilastuti Dwi Nugraha Jati. Dengan mengandalkan pengalamannya sebagai wartawan, Susilastuti Dwi Nugraha Jati mengingatkan bahwa kredo wartawan adalah memperjuangkan kebenaran sehingga wartawan perlu dan patut ditempatkan sebagai agen untuk mempromosikan budaya maritim. Strategisnya peran wartawan ini mengharuskan wartawan memiliki *background* tentang potensi kemaritiman secara menyeluruh. Dalam kenyataannya selama ini potensi kemaritiman yang dipahami wartawan masih sebatas pada persoalan yang tampak di permukaan sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan masih berupa berita-berita lempang (*straight news*). Susilastuti berpendapat perlunya sebuah intervensi agar wartawan bisa memainkan peran strategis secara maksimal dengan mengubah pola relasi antara wartawan dan struktur kuasa yang terlibat dalam masalah kemaritiman.

Bagian kedua membahas isu lingkungan strategis, pertahanan keamanan, dan diplomasi yang diwakili oleh tiga buah tulisan. Posisi geografis dan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan mengharuskan cara pandang yang unik bagi setiap elemen pemerintahan terutama yang berkaitan dengan diplomasi dalam berinteraksi dengan negara lain di kawasan. Terdapat tiga tulisan dalam bagian ini. Tulisan pertama adalah "Membangun Kekuatan Pertahanan di Era Ketidakpastian" oleh Darma Agung Setya Irfiansyah. Dalam tulisannya ini penulis membahas perencanaan pertahanan Indonesia yang dihadapkan pada kondisi ketidakpastian pasca-Perang Dingin dengan aktor-faktor-vektor yang baru. Darma Agung Setya Irfiansyah mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan peningkatan rasio anggaran pertahanan terhadap PDB dan alutsista modern tetapi juga harus didukung dengan peneguhan kembali visi Poros Maritim, pengkajian ulang politik luar negeri, investasi pada teknologi serta restrukturisasi organisasi.

Diplomasi dengan corak wawasan kemaritiman mungkin bukan merupakan hal yang baru, namun implementasi faktual dari konsep itu perlu diperkuat dengan memberikan contoh yang telah ada dalam kancah diplomasi Indonesia selama ini. Untuk itu tulisan kedua dalam bagian ini sangat penting karena mengangkat pengalaman diplomasi Indonesia dalam salah satu organisasi kemaritiman kawasan yaitu CTI-CFF (Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries, and Food Security). Tulisan kedua ini berjudul "CTI-CFF Sebagai Wahana Diplomasi Politik Maritim Indonesia" oleh Hendra Yusran Siry dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan narasumber paling tepat untuk menulis karena pengalamannya menjabat sebagai Interim Executive Director, Regional Secretariat, CTI-CFF pada tahun 2018-2019. Dalam tulisannya ini Hendra Yusran Siry menguraikan sejarah pendirian CTI-CFF yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia. Tidak lupa dijelaskan juga mengenai struktur dan mekanisme operasional sehari-hari CTI-CFF. Di akhir tulisannya Hendra Yusran Siry menekankan pentingnya CTI-CFF menjadi bagian utama strategi diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kelautan.

Tulisan ketiga adalah "Memperkuat Diplomasi Indonesia Dengan Menggunakan Identitas Maritim" oleh Ludiro Madu dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Yogyakarta. Dalam

tulisan ini Ludiro Madu melakukan analisis untuk mengidentifikasi upaya yang perlu dilakukan Indonesia melalui kebijakan luar negeri Indonesia guna mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dan pusat peradaban maritim dunia. Ludiro Madu mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu memainkan faktor strategis dari karakteristik maritim dalam setiap kebijakan luar negeri dan diplomasi di tengah semakin kuatnya perebutan pengaruh antar-negara di kawasan Indo-Pasifik. Karakteristik itu berkaitan dengan penguatan konektivitas maritim di tingkat domestik, kerja sama maritim dengan negara-negara kepulauan dunia, dan kontribusi positif untuk mengurangi konflik maritim.

Bagian berikutnya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia yang diisi dengan empat buah tulisan. Tulisan pertama adalah "Rantai Nilai dan Tata Kelola Sumber Daya Maritim" oleh Lukmandono dan Anang Siswanto dari Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Dalam tulisan tersebut Lukmandono menyampaikan pentingnya model pendekatan rantai nilai yang merupakan rangkaian kegiatan berkesinambungan yang dapat dilakukan oleh institusi terkait sejak memulai produksi produk, penjualan, distribusi, dan penyediaan produk dengan cara yang dapat menambah nilai kepada pelanggan. Tulisan kedua adalah "Nilai dan Ambisi Strategis Haluan Maritim Nasional 2045" oleh Nova Vincentia Pati dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Pada tulisan ini Nova Vincentia Pati mencoba menawarkan konsep investasi maritim Indonesia menuju tahun emas 2045 dengan menggunakan konsep Maritime 2050 dari negara Inggris sebagai pembanding.

Sementara itu, Sylvia Prisca Delima dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta membedah isu pendidikan dan riset kemaritiman dalam tulisan ketiga. Sylvia Prisca Delima menyampaikan hasil riset mengenai arah maritim nasional dengan merangkum sejumlah pembelajaran terbaik dari berbagai negara yang kemudian disilangkan dengan konsep wawasan kemaritiman berbasis geografi manusia Indonesia dan pendekatan pembangunan berbasis maritim. Berdasarkan hasil analisis ini, Sylvia Prisca Delima mengungkapkan sejumlah gagasan pokok berkenaan dengan pendidikan dan riset kemaritiman yang dapat dipertimbangkan serta lompatan yang diperlukan demi mewujudkan visi haluan maritim Indonesia.

Bagian ini ditutup dengan tulisan keempat yang berjudul "Pengelolaan Sumber daya Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Politik" oleh Thomas Nugroho yang berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Thomas Nugroho menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan selama ini. Pengelolaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip dasar berkelanjutan, keterpaduan, transparansi, partisipasi, dan keadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan dan masalah menyangkut realitas sosial, interaksi proses ekonomi, politik, kepentingan, dan kekuasaan dalam pembangunan di masyarakat. Sebagai kesimpulan, penulis menyarankan adanya analisis pengelolaan yang komprehensif berkaitan dengan aspek struktur, aspek kelembagaan, aspek tokoh, dan dinamika interaksi.

Pada bagian berikutnya terdapat dua tulisan yang membahas isu pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Tulisan yang pertama adalah "Pengelolaan Ruang Pesisir dan Perlindungan Masyarakat Pesisir" oleh Hotden Leonardo Nainggolan, salah satu pengajar di Universitas HKBP Nommensen, Medan. Dalam tulisannya ini, Hotmen Leonardo Nainggolan mengkaji pengelolaan ruang pesisir dan perlindungan masyarakat pesisir. Tulisan ini menyimpulkan dua hal penting yaitu: *Pertama*, perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya yang sifatnya lintas wilayah seperti sumber daya perikanan dan kelautan mengingat besarnya kemungkinan timbulnya konflik kewenangan. *Kedua*, salah satu upaya alternatif untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan yang merusak ekosistem pesisir adalah dengan konservasi dan pemulihan sumber daya alam pesisir berkelanjutan melalui pemulihan kawasan mangrove, peningkatan kualitas habitat, peningkatan kualitas kawasan hijau, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kawasan mangrove melalui pendekatan partisipatif dan kemitraan.

Tulisan kedua adalah "Agar Ruang Tak Jadi Raung" yang disampaikan oleh Nikolaus Loy dari UPN Veteran Yogyakarta yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai demokratisasi, formulasi, dan implementasi tata kelola ruang pesisir dalam mengurangi konflik di masa depan. Untuk menjawab masalah ini, Nikolaus Loy menggunakan gagasan Levebre tentang produksi ruang dan konsep *soft space* yang berargumen bahwa pemetaan dan zonasi yang dilakukan negara sering berbenturan

dengan ruang dan lingkungan yang lebih dulu beroperasi yaitu komunitas-komunitas lokal atau adat terkait. Nikolaus Loy berargumen bahwa konflik di masa depan dapat dihindari apabila proses produksi ruang dinegosiasikan secara demokratis yaitu dengan menggunakan pendekatan *soft space*.

Pada bagian ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan terdapat dua tulisan yaitu pertama dari Minto Basuki, akademisi dari ITATS dan Dian Ina Sari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana, Medan. Tulisannya yang berjudul “Ekonomi Maritim *Ship Recycling* dalam Perspektif Teknologi Kelautan” membahas salah satu potensi ekonomi kelautan besar yang sangat menarik yang selama ini luput menjadi perhatian. Potensi tersebut adalah industri *ship recycling* dari kapal-kapal tua yang tidak dapat beroperasi secara ekonomis lagi. Potensi ini cukup besar karena jumlah kapal yang tidak ekonomis tersebut telah mencapai lebih dari 8000 kapal sehingga potensi besi yang dapat didaur ulang mencapai lebih dari 11 juta ton. Sementara itu Dian Ina Sari membahas konsep Ekosistem Logistik Nasional dalam tulisannya yang berjudul “Urgensi Ekosistem Logistik Nasional dalam Roadmap Aspek Kemaritiman dan Aspek Investasi Haluan Maritim Indonesia 2045”. Penulis mengingatkan bahwa Ekosistem Logistik Nasional harus berfungsi sebagai agregator serta kolaborator agar logistik di Indonesia dapat beroperasi secara lebih efisien. Dian Ina Sari mengidentifikasi beberapa isu yang perlu ditindaklanjuti antara lain perlunya penerapan sistem ini di seluruh pelabuhan Indonesia di samping penataan infrastruktur pelabuhan seperti Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), kelembagaan Kekarantinaan, serta tata ruang pelabuhan.

Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan sumbangan dalam penyusunan konsep Haluan Maritim Nasional yang lengkap, lugas, fleksibel, dan bervisi jangka panjang. Disadari sepenuhnya bahwa isu kemaritiman merupakan spektrum yang sangat luas. Keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan tulisan di dalam buku ini baru dapat mengangkat beberapa isu dalam lima tema umum khazanah kemaritiman Indonesia. Namun demikian diharapkan 14 tulisan ini dapat berfungsi selayaknya konstelasi bintang dalam perjalanan kapal di tengah samudra.

Okto Irianto

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Pengantar Editor	v
Bagian 1 Budaya Maritim dan Sejarah Gagasan Kemaritiman Indonesia	1
Mengenapkan Haluan Maritim Nasional: Sarwono Kusumaatmadja	2
Bangkit Budaya Bahari: Peningkatan Literasi Kebaharian dalam Kerangka Haluan Maritim 2045: Memulangkan Sirih Ke Gagangnya, Pinang Ke Tampuknya: Tukul Rameyo Adi	8
Wartawan Sebagai Agency untuk Mempromosikan Budaya Maritim: Susilastuti Dwi Nugraha Jati	32
Bagian 2 Lingkungan Strategis, Pertahanan Keamanan Dan Diplomasi	49
Membangun Kekuatan Pertahanan Di Era Ketidakpastian: Darma Agung Setya Irfiansyah	50
CTI-CFF Sebagai Wahana Diplomasi Politik Maritim Indonesia: Hendra Yusran Siry	71
Memperkuat Diplomasi Indonesia dengan Menggunakan Identitas Maritim: Ludiro Madu	105
Bagian 3 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	121
Rantai Nilai dan Tata Kelola Sumber Daya Maritim: Lukmandono - Anang Siswanto	122
Nilai dan Ambisi Strategis Haluan Maritim Nasional 2045: Nova Vincentia Pati	140
Transformasi Pembangunan Manusia dan Penalaran Daya Lenting Maritim: Gagasan Pendidikan dan Riset Kemaritiman untuk Mewujudkan Visi Haluan Maritim Nasional 2045: Sylvia Prisca Delima	158
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Politik: Thomas Nugroho	178
Bagian 4 Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut	201
Pengelolaan Ruang Pesisir dan Perlindungan Masyarakat Pesisir: Hotden Leonardo Nainggolan	202
Agar Ruang Tak Jadi Raung: Nikolaus Loy	230
Bagian 5 Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan	249
Ekonomi Maritim Ship Recycling dalam Perpektif Teknologi Kelautan: Minto Basuki	250
Urgensi Ekosistem Logistik Nasional dalam Roadmap Aspek Kemaritiman dan Aspek Investasi Haluan Maritim Indonesia 2045: Dian Inda Sari	269
Biodata Singkat Penulis	293

WARTAWAN SEBAGAI *AGENCY* UNTUK MEMPROMOSIKAN BUDAYA MARITIM

Oleh: **Susilastuti Dwi Nugraha Jati**

ABSTRAK

Wartawan adalah individu yang aktif untuk merespons fakta yang terjadi dalam masyarakat. Keaktifan ini terkadang menimbulkan iritasi dan resonansi bagi struktur kuasa. Relasi antara wartawan dan struktur kuasa perlu diperbaiki dengan saling memahami posisi masing-masing dalam fakta dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Wartawan tidak dalam posisi yang netral ketika terdapat saling klaim atas satu fakta yang ada dalam masyarakat. Wartawan menempatkan diri sebagai pihak independent. Wartawan senantiasa bergerak untuk memperjuangkan truth. Dalam posisi yang strategis ini wartawan perlu ditempatkan sebagai agency untuk mempromosikan budaya maritim. Strategisnya peran wartawan ini mengharuskan wartawan memiliki background tentang potensi budaya maritim secara holistik. Potensi budaya maritim yang dipahami wartawan masih sebatas pada persoalan yang tampak di permukaan. Akibatnya, karya jurnalistik yang dihasilkan masih berupa berita-berita lempang (straight news). Wartawan masih terjebak dalam satu fakta satu ke fakta lainnya yang sehingga benang merah terhadap fakta yang ditulis sering terabaikan. Hal tersebut tentu berdampak bagi pembaca terutama dalam memahami persoalan budaya maritim. Berkaitan dengan itu, perlu sebuah intervensi agar wartawan bisa memainkan peran strategis secara maksimal dengan mengubah pola relasi antara wartawan dan struktur kuasa yang terlibat dalam masalah budaya maritim. Perubahan relasi ini akan membangun pemahaman bersama tentang posisi wartawan sebagai agency yang aktif merespons semua fakta dan peristiwa yang terkait budaya maritim. Keterbukaan struktur kuasa bisa membantu wartawan dalam mengembangkan liputan berkedalaman. Liputan berkedalaman ini menjadi solusi agar wartawan bisa menjadi agency dalam mempromosikan budaya maritim.

Kata Kunci: *Wartawan, Agency, Berita, Straight News, Indepth Reporting.*

PENDAHULUAN

Di era disrupsi informasi, masyarakat setiap hari dihujani limpahan informasi dari berbagai media massa maupun media sosial. Kita semua tidak bisa mengelak dari terpaaan informasi. Kemajuan teknologi komunikasi informasi juga memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara *mobile*. Perkembangan ini di satu sisi merupakan kemajuan yang luar biasa, di sisi lain juga menjadi masalah terutama bila *literacy* media belum secara optimal diterima masyarakat.

Di tengah limpahan informasi tadi masyarakat mempunyai keleluasaan untuk memilih informasi yang akan dipilih. Sebagaimana teori *Uses and Gratification* yang digagas oleh Herbert Blumer dan Elihu Kartz dalam Nurudin (2017) secara garis besar mengasumsikan bahwa masyarakat aktif dalam memilih sumber informasi sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat tidak pasif dan dengan mudah untuk menerima informasi. Masyarakat mempunyai agenda tersendiri terkait dengan informasi yang akan dipilihnya.

Dalam perspektif ini kita bisa membayangkan, informasi terkait masalah budaya maritim akan menjadi kebutuhan yang kesekian atau bahkan tidak dibutuhkan sama sekali, apabila masyarakat tidak merasa memiliki kebutuhan akan informasi tersebut. Namun bukan berarti informasi tentang budaya maritim tidak pernah menghiasi media massa di Indonesia. Pertanyaannya, informasi budaya maritim yang seperti apa yang selama ini diterima oleh masyarakat?

Ketika kita berbicara tentang informasi seperti apa yang selama ini ada di media massa, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari individu yang menjadi ujung tombak media massa untuk mengolah informasi tentang fakta dan peristiwa budaya maritim menjadi berita, yaitu wartawan. Wartawan adalah individu yang menjalankan profesi untuk mencari, mengolah, menulis informasi fakta dan peristiwa menjadi berita.

Wartawan bukanlah individu yang pasif. Wartawan adalah individu yang aktif yang senantiasa merespons fakta dan peristiwa yang ada dalam masyarakat. Keaktifan wartawan ini didasarkan pedoman etik yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan Indonesia, nilai berita dan layak berita, sebagai individu yang aktif bergerak wartawan juga tidak bergerak dalam

ruang yang kosong. Ia akan berhadapan dengan struktur kuasa di luar dirinya, serta struktur kuasa di ruang *news room* (ruang redaksi). Dialekta inilah yang mengharuskan wartawan ketika bergerak harus senantiasa memiliki bekal cukup atas fakta dan peristiwa yang ditemui.

Wartawan menurut Bagir Manan (2014) termasuk kelompok *avant-grade*. Ia menjadi komunikator di antara kelompok-kelompok masyarakat yang majemuk. Menjadi komunikator antara pemerintah dan masyarakat. Menjadi penggerak dan pengecam, wartawan sebagai individu mempunyai sebuah keunikan karena wartawan mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap fakta dan peristiwa yang bersinggungan dengan struktur di luar dirinya, termasuk struktur kuasa. Keterlibatan wartawan melalui tulisan yang dimuat di media tempatnya bekerja adakalanya menimbulkan ketegangan (*contentious*), mengelitik pihak lain sehingga struktur meresponsnya.

Kompleksitas persoalan yang ada dalam masyarakat yang disebabkan oleh saling klaim antarstruktur dalam masyarakat maupun di dalam struktur dalam masyarakat sering kali menjerat wartawan untuk terjebak dari konflik satu ke konflik lainnya, atau dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Hal ini disebabkan wartawan harus senantiasa mengikuti fakta dan peristiwa yang faktual yang terkadang tidak ada relevansi dengan peristiwa sebelumnya, keterbatasan akses untuk bisa mendalami fakta dan peristiwa yang ditulis, keterbatasan informasi (*background*) atas satu fakta atau peristiwa yang ditulisnya.

Misalnya, peristiwa tentang kecelakaan yang menimpa nelayan di perbatasan Indonesia–Malaysia hanya dimaknai sebagai peristiwa *on the spot* (*hard news*). Akibatnya, fakta itu hanya ditulis dengan mengedepankan aspek *what*, *who*, *when*, dan *where*. Aspek *why* dan *how* tidak dimunculkan sehingga peristiwa itu secara cepat menghilang akan digantikan dengan peristiwa lainnya (lihat <https://rri.co.id/batam/1623-tanggap-bencana/1256069/5-korban-kru-kapal-tenggelam-di-perbatasan-perairan-malaysia-berhasil-di-evakuasi-polres-karimun-dan-tim-sar> akses tanggal 12 November 2021). Hal serupa juga bisa kita lihat dalam berita tentang masalah limbah akibat eksplorasi minyak di laut hanya dilihat sebatas bahwa laut tercemari limbah tanpa ada pembahasan lebih lanjut tentang hal itu (<http://m.batamtoday.com/berita-169056-Warga-Dihebohkan-Tumpahan-Minyak-Hitam-di-Perairan-Sekitar-Pertamina-Tanjunguban.html>). Akses tanggal 11 November 2021). Sementara untuk persoalan yang

menyangkut kepentingan pemerintah juga diberitakan dengan struktur berita *straight news* (<https://www.kejoranews.com/2021/11/minimal-ada-387-titik-lahan-budidaya.html>).

Berdasarkan paparan di atas, untuk menempatkan media massa sebagai media promosi untuk budaya maritim maka yang diperlukan adalah bagaimana melihat wartawan sebagai ujung tombak sebuah media melakukan aktivitas jurnalistiknya, kendala yang dihadapi dan upaya meningkatkan pemahaman wartawan terkait masalah budaya maritim dengan kompleksitas di dalamnya. Melalui upaya tersebut maka wartawan tidak hanya terjebak dari satu fakta ke fakta yang lain dengan tidak mencoba membantu memberikan jalan keluar.

WARTAWAN ADALAH AGENCY PERUBAHAN

Wartawan adalah individu yang aktif. Dalam aktivitas jurnalismenya, wartawan selalu berhadapan dengan struktur kuasa di luar dirinya, serta struktur di ruang redaksi. Dialektika ini mengharuskan wartawan harus bisa memainkan siasat agar apa yang ditulisnya bisa diterbitkan oleh media di mana dia bekerja.

Keaktifan wartawan ini menempatkan wartawan sebagai *agency*. *Agency* menurut pemikiran Giddens adalah individu yang secara sengaja melakukan tindakan, tindakan yang diambilnya memiliki konsekuensi. *Agency* mempunyai kemampuan untuk membuat deskripsi tentang apa yang dilihatnya. *Agency* tidak mengacu pada maksud-maksud yang dimiliki orang ketika melakukan sesuatu melainkan pada kemampuannya dalam melakukan sesuatu itu sehingga *agency* itu mengandung kuasa.

Agency berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apa pun dalam sebuah urutan tindakan. Tindakan yang diambil individu merupakan sebuah proses berkesinambungan. Kekuasaan dalam sistem-sistem sosial memiliki kontinuitas di sepanjang ruang dan waktu dengan mengandaikan rutinitas relasi-relasi kemandirian dan kebergantungan di antara para aktor dan kelompok dalam konteks sosial. *Agency* melalui tindakan yang diambilnya akan memengaruhi kekuasaan yang dijalankan oleh orang lain (Anthony Giddens, 2010).

Wartawan sebagai *agency* akan selalu secara kontinu aktif merespons struktur di luar dirinya. Respons wartawan ini dituangkan dalam bentuk

tulisan yang diolah menjadi berita, bisa *straight news*, *feature*, *indepth reporting*. Tulisan wartawan yang menjadi informasi bagi masyarakat maupun struktur kuasa yang bisa menimbulkan ketegangan (*contentious*). Ketegangan bisa direspons struktur atau tidak. Ketegangan yang muncul akibat tulisan wartawan berlangsung dalam waktu tertentu sampai terbuka ruang untuk terjadinya sebuah perubahan atau tidak sama sekali.

Secara normatif keberadaan wartawan dijamin oleh undang-undang. Individu bisa disebut wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bila orang itu secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ada tiga pasal dalam Undang-Undang ini yang menyebutkan tentang wartawan.

Pertama, Pasal 4 ayat (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan, tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Kedua, Pasal 7 ayat (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Ayat (2): wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Adapun yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ketiga, Pasal 8 dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bill Kovach dan Tom Rosentiels (2001) menstandarkan perilaku wartawan ke dalam sembilan elemen jurnalisme. Kesembilan elemen ini adalah dasar sebuah jurnalisme. Kesembilan elemen ini adalah (1) kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran, (2) loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara, (3) esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi, (4) jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya, (5) jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan, (6) jurnalis harus memberi forum bagi

publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, (7) jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, (8) jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, dan (9) jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya.

Wartawan adalah sebuah profesi sehingga dalam menjalankan profesinya wartawan harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini sebagai landasan moral dan etika sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas profesionalitas. Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers ada tujuh pasal.

Namun masing-masing organisasi profesi wartawan juga memiliki kode etik yang acuannya tidak berbeda jauh dengan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Secara garis besar kode etik ini mencakup tentang tata cara peliputan, tata cara penulisan berita, kejujuran dalam mengungkapkan fakta, jaminan melindungi narasumber, tidak mencampuri ranah privat narasumber kecuali untuk kepentingan publik, serta kesediaan meminta maaf bila ada berita yang salah atau tidak akurat. Selain itu, wartawan juga dibekali beberapa pedoman penulisan seperti (1) pedoman penulisan ramah anak, (2) pedoman pemberitaan media siber, (3) pedoman peliputan terorisme, dan (4) pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri.

Di Indonesia, wartawan biasanya bekerja di institusi pers yang merupakan institusi publik, dan merupakan cara terlibat pada peri kehidupan publik (termasuk simpati pada persoalan politik). Tidak semua tulisan wartawan akan direspons oleh struktur. Demikian juga sebaliknya, tidak semua fakta dan peristiwa akan direspons wartawan. Ada kalanya wartawan akan mendukung struktur yang ada. Ideologi wartawan, kelompoknya, lingkungan tempatnya bekerja, sistem sosial politik serta aturan-aturan yang ada memengaruhi bagaimana cara wartawan memberikan respons terhadap struktur.

BERITA SEBAGAI KARYA JURNALISTIK WARTAWAN

Wartawan sebagai *agency* pada dasarnya memotret fakta dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tidak semua fakta dan peristiwa

direspons oleh wartawan. Hanya peristiwa yang mempunyai nilai berita dan layak beritalah yang akan direspons oleh wartawan sebagai bahan tulisannya.

Nilai berita adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap berita, dan ini menjadi acuan bagi wartawan ketika berhadapan dengan fakta dan peristiwa. Secara universal nilai berita yang senantiasa dipegang wartawan adalah (1) termasa atau terbaru. Hal ini berkaitan dengan aktualitas (2) *proximity* (jarak) terhadap *audience* yang terkena informasi. Dalam konteks sekarang bisa *scope* lebih luas, terutama untuk media *online*, (3) penting (ternama) berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang akan diberitakan, (4) keluarbiasaan dari fakta dan peristiwa, (5) dampak, mengandung arti apa pengaruhnya ketika fakta atau peristiwa diberitakan, (6) ketegangan dari fakta dan peristiwa. Berapa nilai berita yang menjadi pertimbangan wartawan sangat tergantung dari media massa di mana ia bekerja ((John C Merrill (ed), 1983) (Brians S Brooks dkk, 1995), (Sedia Willis Barus (2011), Zaenudin HM,2011)).

Fakta atau peristiwa telah memenuhi nilai berita tidak secara otomatis berita langsung dimuat di media massa. Pertimbangan lainnya adalah layak berita. Layak berita bisa dipahami sebagai perpaduan antara nilai berita dan kebijakan redaksional. Bisa saja satu fakta dan peristiwa memenuhi sejumlah nilai berita, tetapi tidak sejalan dengan kebijakan redaksional maka berita tersebut akan di-*blackout* (peristiwa yang besar dicekikan maknanya) atau bahkan tidak diberitakan sama sekali. Sementara untuk media massa yang lain, fakta atau peristiwa tersebut sejalan dengan kebijakan redaksional maka media tersebut akan melakukan *blowup* (dibesar-besarkan).

Hal ini menunjukkan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan hasil akhir sebuah berita tidak berada dalam ruang kosong yang tidak ada pertarungan kepentingan di dalamnya. Sirikit Syah (2011) mengemukakan, wartawan tidaklah bekerja dalam ruang yang kosong, ada nilai-nilai dalam diri wartawan yang mendorongnya merespons satu fakta dan peristiwa dalam masyarakat. Wartawan tidak bisa lagi menganggap dirinya bekerja di ruang hampa yang hanya menulis fakta, atau angkat tangan kalau terjadi apa-apa. Wartawan mempunyai peran dalam memilih fakta dan narasumber. Siapa dan apa yang akan dipilih wartawan sangat tergantung pada nurani wartawan.

Produk berita yang dihasilkan wartawan memiliki beragam bentuk yaitu *straight news*, *feature*, dan *indepth reporting*. Ketiga jenis berita ini mempunyai perbedaan dalam hal cara peliputan dan penulisannya. Berita *straight news* sering juga disebut berita lempang, atau berita keras. Jenis berita mempunyai karakter khas yaitu adanya *dateline* (baris tanggal) sebelum *lead*. *Lead* atau teras berita merupakan intisari sebuah berita, struktur penulisan adalah struktur piramida terbalik. *Feature* adalah jenis berita *soft* dan struktur penulisan adalah struktur blok. *Indepth reporting* adalah jenis berita berkedalaman. Pengembangan fakta berita berkedalaman ini adalah pengembangan berita *straight news* yang dianggap oleh wartawan membawa dampak bagi masyarakat ((Septian, Santana, 2003), (Sedia Willing Barus, 2011)).

Straight news atau berita lempang hanya menjelaskan kronologis kejadian. Jenis berita ini paling banyak dijumpai pada pemberitaan media massa. Jenis berita ini lebih menekankan pada aspek *what*, *where*, *when*, dan *who*. Sementara aspek *why* dan *how* tidak banyak dimunculkan. Struktur beritanya adalah struktur piramida terbalik. Struktur ini menekankan fakta yang paling penting dijadikan *lead* (teras berita), tubuh berita semakin ke bawah dianggap tidak penting.

Jenis berita *straight news* mendominasi media-media *online* serta surat kabar harian, berita radio televisi. Hal ini disebabkan *audience* membutuhkan berita yang cepat tentang kejadian sehari-hari. Informasi ini sebagai dasar masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nilai berita yang sering menjadi dasar wartawan dalam mengolah fakta dan peristiwa menjadi berita adalah *actual*, *proximity*, keluarbiasaan (keterkenalan)—berkaitan dengan aspek *who* (siapa). Prinsip, pembaca membaca berita *straight news* butuh kecepatan informasi.

Feature adalah salah satu jenis berita yang tidak terikat dengan waktu. Artinya, fakta atau peristiwa tidak akan kedaluwarsa meskipun kejadiannya sudah terjadi beberapa hari. Nilai berita yang menjadi acuan wartawan dalam memilih jenis berita ini terutama adalah sisi humanismenya. Berita *feature* ini menggunakan struktur blok dimana *lead* tidak mesti menjadi aspek yang penting. Struktur berita ini antara alinea satu dengan alinea yang lain saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berita *feature* ini banyak ditemui di surat kabar harian, media *online*, dan majalah. Namun jumlahnya tidak sebanyak berita *straight news*.

Jenis berita yang lain adalah *indepth reporting* atau berita berkedalaman. *Indepth reporting* bisa digali melalui *news analysis*, jurnalisme persisi, *participant reporting*, atau kombinasi dari keduanya. Berita jenis ini biasanya didahului dengan berita *straight news* dan biasanya berita tersebut dinilai mempunyai dampak bagi kepentingan publik sehingga perlu digali lebih dalam. Namun tidak semua fakta atau peristiwa bisa dikembangkan dengan *indepth reporting*. Penekanan lebih pada aspek kedalaman dan dampaknya bagi kepentingan publik.

Penulisan berita jenis ini menggunakan struktur blok dan aspek *why* dan *how* mendapatkan porsi yang besar. Aktualitas dari sebuah fakta dan peristiwa bukan pada aspek kapan terjadinya tetapi lebih pada kebaruan data yang ditemukan. Berbeda dengan *straight news*, *indepth reporting* dalam melihat sebuah fakta dan peristiwa seperti satelit (*satelit zooming*). Fakta dan peristiwa digali secara holistik (menyeluruh) bukan secara parsial.

Investigasi *reporting* adalah pencarian fakta dan peristiwa mendasarkan pada informasi yang terkadang belum jelas kebenarannya. Wartawan akan membuktikan informasi tersebut, setelah yakin informasi akurat, maka wartawan akan mengembangkan temuannya dengan menemukan fakta-fakta secara holistik.

Indepth reporting dan *investigasi reporting* tidak bisa digali oleh satu atau dua orang wartawan. Biasanya dilakukan secara *team works* dengan dukungan data-data untuk memperkuat fakta yang ditulis.

Terlepas apa pun jenis berita yang akan dikembangkan, seorang wartawan adalah seseorang yang dipekerjakan untuk secara teratur terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran (kegiatan) berita dan informasi (*output*) untuk melayani kepentingan publik (peran sosial). Peran dasar wartawan adalah untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman, untuk bekerja dengan kejujuran, kejelasan dan kasih sayang, untuk memberikan suara bagi yang sangat miskin, yang tertindas, untuk menantang *stereotip* dan mengekspos korupsi dan berbohong, serta menghormati keragaman dan perbedaan ((Thomas Kent. 2015), (Ricard Karble,2010)).

Apa pun struktur berita yang dipilih, wartawan akan menjaga objektivitasnya. Objektivitas terdiri dari dua dimensi, *pertama*, faktualitas yaitu usaha mencari kebenaran atau *truth*, dimana berita harus harus

relevan dengan pembaca dan mempunyai nilai berita. *Kedua, impartialitas* mengacu pada praktik-praktik jurnalistik yang mengedepankan *balance, nonpartisanship, dan neutral presentation*. *Balance* berarti ada unsur keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan. *Neutralitas* berarti tidak membangun opini untuk kepentingan tertentu. Objektivitas dalam jurnalisme tidak mungkin mencapai tingkat yang sempurna 100 persen (Amir Efendi Siregar, 2015).

INDEPTH REPORTING PENGEMBANGAN BUDAYA MARITIM

Ketika menempatkan wartawan sebagai *agency* untuk mendorong pengembangan budaya maritim, maka kita harus mencoba melihat persoalan apa yang sebenarnya bisa dikembangkan, kemudian jenis berita apa yang akan dikembangkan. Seperti yang kita pahami bersama, budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, dan aturan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa, dan politik masyarakat nelayan dan nonnelayan untuk mencapai kepentingan sosial ekonomi guna menghasilkan produk (Retno Adriati, 2016).

Pemerintah telah menetapkan Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai visi pembangunan nasional Indonesia. Dengan visi ini maka pemerintah mulai mengarah pada pembangunan dan pemanfaatan potensi laut. Visi ini ditopang oleh lima pilar yang tertuang dalam berbagai regulasi yaitu: (1) Budaya maritim; 2) Pembangunan kedaulatan pangan laut; 3) Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; 4) Diplomasi maritim; serta 5) Kekuatan pertahanan maritim (Meity Josephin, 2016).

Dalam konteks ini pemerintah akan membuat regulasi yang akan *men-suport* pengembangan budaya maritim. Wartawan sebagai *agency* akan merespons setiap proses bagaimana regulasi dibuat, bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Tentunya dalam merespons kebijakan-kebijakan pemerintah tetap bersikap *independent* untuk memperjuangkan *truth* (kebenaran) untuk kepentingan publik.

Dalam posisinya seperti ini, wartawan bisa jadi akan menjadi resonansi bagi struktur kuasa terutama bila kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan publik, termasuk lingkungan dimana publik berada.

Ambillah contoh, bagaimana media-media menyoroiti problem yang muncul terkait dengan potensi-potensi budaya maritim yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya, wartawan sebagai *agency* sudah merespons setiap persoalan terkait budaya maritim, namun masih dalam berita *straight news*. Hal ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi upaya promosi budaya maritim karena hanya mampu menampilkan permasalahan dipermukaan saja, bahkan terkadang satu persoalan dengan persoalan lainnya terlepas sehingga tidak ada benang merah.

Misalnya, persoalan pembakaran kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Australia pada 9 November 2021 hanya dilihat dalam perpesktif secara parsial yaitu dalam persoalan kriminal. Padahal wartawan bisa mengembangkan lebih jauh pada persoalan hubungan bilateral Indonesia–Australia. Sayangnya, masalah ini tidak diungkap secara lengkap (Kabar Batam.Com *Dampak pembakaran Kapal nelayan Indonesesia KKP Tunda patrol Bersama dengan ABF Australia*).

Berita tentang dugaan pungutan ilegal yang dituduhkan kepada otoritas keamanan RI terkait penahanan kapal asing (Batamnews.com, 15 November 2021. *Reuters beritakan Pemilik Kapal Asing di Kepri Bayar Ilegal Rp 4,2 Miliar, TNI AL Membantah*). Dalam berita ini hanya memberitakan saling klaim antara pihak yang berkaitan dengan kapal asing yang ditahan dan struktur kuasa dalam hal ini TNI AL. Berita ini tidak salah karena sumbernya jelas dan mencoba menjaga keberimbangan. Menjadi persoalan bila fakta ini tidak mencoba dikembangkan dan digali secara serius untuk membuktikan bahwa dugaan tersebut tidak benar. Wartawan tentunya perlu diberi akses untuk menjangkau lokasi kejadian untuk membuktikan bahwa klaim dari struktur kuasa adalah benar.

Mengacu pada lima pilar dalam pengembangan budaya maritim, wartawan tidak bisa hanya mengandalkan pada liputan untuk berita *straight news*. Ambillah contoh, regulasi yang terkait dengan masalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Implementasi dari regulasi ini sarat dengan kepentingan politik, sedangkan kepentingan ekonomi dari pihak yang akan digandeng struktur kuasa. Di sisi lain, masyarakat menjadi pihak yang juga terimbas dalam pengembangan infrastruktur.

Secara empirik persoalan di atas akan menempatkan wartawan selaku *agency* dalam posisi sebagai fungsi-kritis monitorial (*critical-*

monitorial function). Wartawan menjalankan peran sebagai 'Fourth Estate'. Peran ini mencakup: (1) *Peran monitor* adalah peran paling pasif dari tiga peran kritis-monitor (*critical-monitorial function*), (2) *Peran penyelidik yang* didefinisikan melalui berbagai praktik investigasi yang digunakan untuk meneliti klaim dan pernyataan pemerintah dan mengumpulkan informasi tentang berbagai isu yang wartawan anggap sebagai hal yang mencurigakan, (3) Peran pengawas (*watchdog*) bahkan lebih aktif dan tegas. Legitimasi *watchdog* untuk bertindak di arena politik paling kuat terlihat pada posisi institusional jurnalistik ketika berhadapan dengan kekuatan yang ada (Thomas Hanitzsch dan Thomas Vos, 2018).

Bisa juga wartawan akan memainkan peran dimensi kolaboratif-fasilitatif (*collaborative-facilitative dimension*) yang oleh Thomas Hanitzsch dan Thomas Vos, (2018) dipahami wartawan bertindak sebagai mitra pemerintah dan mendukung upaya pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan sosial. (1) Sebagai *fasilitator*, wartawan merasa peran jurnalistiknya sebagai bagian tanggung jawab sosial mereka untuk membantu pemerintah dalam upaya memajukan pembangunan sosial dan ekonomi negara. (2) *Kolaborator* merupakan peran lebih jauh lagi dengan berpegang pada gagasan bahwa sebagai komunikator publik, wartawan tidak berbeda dari, tetapi bagian dari 'aparatur negara'. (3) Peran *mouthpiece* memuat informasi resmi dan kemudian disampaikan ke masyarakat. Dalam hal ini, tugas wartawan adalah memberikan legitimasi kepada pemerintah dengan menjelaskan berbagai keputusan politik kepada masyarakat dan memandu opini publik.

Kedua peran yang akan dimainkan oleh wartawan memerlukan pemahaman yang utuh terhadap persoalan budaya maritim tidak hanya dalam tataran normatif. Hal ini akan membantu wartawan untuk melihat fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan budaya maritim secara holistik.

Kembali kepada gagasan awal untuk menguatkan *positioning*-wartawan sebagai *agency* untuk pengembangan budaya maritim melalui pengembangan liputan *indepth reporting* maka beberapa persoalan yang perlu dikritisi dari aspek wartawan. *Pertama*, budaya maritim masih dipahami secara parsial. Budaya maritim bisa jadi masih dipahami sebagai persoalan yang berhubungan dengan masalah penyeludupan barang-barang ilegal, pencurian ikan, perdagangan orang, dan lainnya. Padahal persoalan maritim mempunyai perspektif luas secara sosial, ekonomi, maupun politis.

Kedua, keterbatasan akses dalam melakukan peliputan budaya maritim. Mengingat bicara budaya maritim membutuhkan sarana yang lebih kompleks untuk bisa menjangkau lokasi peristiwa. Misalnya, mendapatkan informasi tentang bagaimana armada laut Indonesia menghalau kapal asing, bagaimana penanganan kapal-kapal asing yang telah mencuri ikan dan sebagainya. Dalam diskusi pada pelatihan jurnalisme budaya maritim berwawasan kebangsaan (26/10), wartawan mengakui meliput masalah budaya maritim tidak mudah karena luasnya jangkauan dan keterbatasan akses. Wartawan sering kali mengikuti nelayan di laut lepas untuk mendapatkan data, membuktikan informasi kapal-kapal asing yang mencoba mencuri potensi ikan.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dari media dimana wartawan bekerja. Sumber daya mencakup sumber daya manusia dan *supporting* untuk peliputan. Peliputan *indepth reporting* membutuhkan kerja tim serta finansial yang tidak sedikit. Tidak semua media mampu membiayai hal itu. Merupakan satu kewajaran apabila wartawan masih terbatas menulis dalam bentuk *straight news* dengan mengandalkan pada sumber informasi rutin (struktur kuasa atau narasumber dari masyarakat) dan sifatnya masih berorientasi psikologis, yaitu apa yang dipikirkan orang atas satu fakta tertentu.

Indepth reporting memberikan ruang bagi wartawan untuk melakukan interpretasi atas fakta (bukan opini pribadi). Kurangnya pemahaman tentang jenis liputan ini adakalanya wartawan tidak menyadarinya. Namun adakalanya wartawan tidak memiliki pemahaman tentang jenis berita yang dihasilkan, tetapi ia melakukan dalam praktik kesehariannya (Dida Dirgahayu, 2016). Bisa jadi karya jurnalistik yang dihasilkan menjadi tidak maksimal.

Persoalan yang harus dikritisi dari aspek struktur kuasa, *pertama*, cara pandang terhadap wartawan perlu diubah. Regulasi tentang pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pada struktur kuasa, masyarakat tidak diperbolehkan menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk mendata data terkait fakta dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Kedua, struktur kuasa perlu membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan masalah budaya maritim. Informasi ini bisa sebagai

informasi yang bersifat: (1) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber, (2) Informasi latar belakang: adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya, (3) *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh diberitakan atau disiarkan (Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik). Apa pun sifat informasi yang disampaikan perlu diberikan alasan.

Ketiga, struktur kuasa juga mempunyai kewajiban ikut meningkatkan pengetahuan wartawan tentang masalah budaya maritim melalui pelatihan-pelatihan dengan tema-tema khusus. Misalnya, *illegal fishing*, *trafficking*, keamanan maritim, dan lainnya.

Keempat, bila terjadi kasus-kasus khusus dengan letak kejadian yang jauh dari jangkauan wartawan, struktur kuasa perlu mengajak wartawan. Kehadiran wartawan secara langsung akan sangat membantu memperkaya perspektif atas persoalan budaya maritim.

REKOMENDASI

Sinergi antara wartawan selaku *agency* dan struktur kuasa perlu ditingkatkan untuk membantu mempromosikan budaya maritim. Budaya maritim tidak bisa hanya diuraikan dalam sebuah kertas kerja berupa program kerja serta regulasi yang akan mengatur agar bisa diimplementasikan.

Budaya maritim membutuhkan *supporting* salah satunya melalui pemberitaan di media massa dari berbagai jenis *platform*. Ujung tombak media massa adalah wartawan. Wartawan adalah individu yang aktif bergerak dan tidak bekerja dalam ruang yang kosong. Keaktifan wartawan dalam merespons atas fakta dan peristiwa inilah menempatkan dirinya sebagai *agency*.

Wartawan sebagai *agency* memainkan peran dan senantiasa berkaitan dengan kehidupan politik. Wartawan akan merespons setiap kebijakan politik yang dalam perspektif wartawan akan mengancam kepentingan publik. Dalam posisi semacam ini, wartawan sering kali oleh struktur kuasa sebagai iritasi atau resonansi. Akibatnya bisa memunculkan ketegangan-ketegangan yang pada gilirannya tidak menguntungkan upaya mempromosikan budaya maritim.

Untuk memperbaiki relasi antara wartawan dan struktur kuasa terkait dengan masalah mempromosikan budaya maritim, maka wartawan perlu didorong untuk mengembangkan penulisan *indepth reporting* dibandingkan penulisan *straight news*. Melalui tulisan *indepth reporting*, masyarakat akan mendapatkan informasi yang berkecukupan tentang budaya maritim.

Struktur kuasa perlu *men-support* wartawan untuk bisa menghasilkan tulisan *indepth reporting* dengan memberikan ruang dan akses untuk mendapatkan data terkait fakta atau peristiwa yang terkait dengan budaya maritim, mengingat luas dan kompleksitasnya cakupan liputan budaya maritim.

Struktur kuasa juga perlu membuka akses yang luas bagi wartawan bila ada fakta dan peristiwa yang terkait dengan budaya maritim. Informasi yang disampaikan wartawan baik sebagai embargo, informasi latar belakang, maupun *off the record* harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pelatihan-pelatihan untuk wartawan yang berkaitan dengan masalah spesifik tentang budaya maritim perlu dilakukan secara kontinu. Hal ini untuk membantu wartawan lebih memahami persoalan tentang budaya maritim secara holistik.

REFERENSI

- Andriati, Retno, *Pengembangan Budaya Maritim di Indonesia sebagai Strategi Adaptasi*, https://repository.unair.ac.id/95874/2/7A_PENEGEMBANGAN%20BUDAYA%20MIRITIM-converted.pdf, akses 12 November 2021).
- Barus Willing, S. 2011. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Surabaya: Erlangga.
- Dirgahayu, D. 2016. *Persepsi Wartawan terhadap Jurnalistik Investigasi*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.18 No. 1 Juli 2015.
- Giddens, A. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial dalam Masyarakat*, terjemahan Maufur dan Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Josephin, Meitty, *Budaya Maritim Indonesia, Quo Vadis?* <https://binus.ac.id/characterbuilding/2021/07/budaya-maritim-indonesia-quo-vadis/> akses 12 November 2021.
- Karble, R. 2009. *Ethics of journalist, British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016*. This edition published 2009 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informasi business © 2001.
- Kent, T. 2015. *Who's a Journalist? Closing in on a Definition*. Copyright©2015. The HuffingtonPost.com, Inc. "The Huffington Post" is a registered trademark of The Huffington Post.com, Inc. All rights reserved. Part of HuffPost Business - AOL Money & Financen.
- Manan, Bagir. 2014. *Tantangan Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Merril, John, C(ed). 1995. *Global Journalism*, Longman Publisher, USA.
- Nurudin. 2017. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ranly, D, Brooks, B, Kennedy, K, Moen, D. 1987. *News Reporting and Writing*. New York: St Martin Press.
- Rosentiels, Bill K. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalistik*. Jakarta: Pantau.
- Sentana, S. 2003. *Jurnalisme Investigasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Siregar, E.A. 2015. *Meningkatkan Profesionalisme Wartawan: Bekerja untuk Publik dengan Objektif, Independen, dan Netral*. Jurnal Dewan Pers, Edisi No. 11, Desember 2015.

- Syah, S. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaenuddin. 2011. *The Journalist*. Jakarta: Simbiosis Reka Utama.
- Vos, Thomas, Hanitzsch, Thomas, 2018. *Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life*. Journalism 2018, Vol. 19(2) 146 –164e
- The Author(s) 2016. *Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav* DOI: 10.1177/1464884916673386journals.sagepub.com/home/j.

Berita Media Massa

- <https://kabarbatam.com/dampak-pembakaran-kapal-nelayan-indonesia-kkp-tunda-patrol-bersama-dengan-abf-australia/>
- <https://www.batamnews.co.id/berita-83030-reuters-beritakan-pemilik-kapal-asing-di-kepri-bayar-ilegal-rp-4-2-miliar-tni-al-membantah.html>
- <https://poroskepri.com/2021/11/09/kkp-sedang-kaji-skema-natuna-semoga-potensi-ikan-natuna-1-juta-ton-per-tahun-segara-bisa-tingkatkan-pad/>
- <https://uand-a.com/2021/11/pt-timah-tbk-salurkan-bantuan-kepada-kub-nelayan-perbatasan-desa-pongkar/>
- <https://www.jpnn.com/news/tiga-kapal-indonesia-dibakar-dan-hasil-tangkapan-lautnya-disita-karena-aktivitas-ilegal-di-perairan-australia>
- <https://deltakepri.co.id/potensi-maritim-jadi-prioritas-serius-gubernur-ansar/>

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Kode Etik Jurnalistik yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/V/2006 tentang Kode Etik.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Lahir pada tanggal 24 Juli 1943. Meraih gelar sarjana pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Beberapa kali menjabat sebagai menteri di Kabinet yang berbeda. Merupakan menteri ke-2 yang memimpin lembaga lingkungan hidup pada Kabinet Pembangunan VI di tahun 1993-1998. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V tahun 1988-1993. Terakhir menjabat sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia ke-1 (1999-2001). Selain itu juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta untuk masa bakti 2004-2009.

Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, MT.

Adalah Ketua Tim Substantif Pokja Penyusunan Haluan Maritim 2045, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosio-Antropologi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2017-2020). Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Kemaritiman Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.

Susilastuti Dwi Nugraha Jati

Dibesarkan di lingkungan keluarga pendidik dan tinggal di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1988), S2 Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (2002), S3 Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan (2020). Karirnya dimulai menjadi Jurnalis di Surat Kabar Harian SKH Bernas Yogyakarta (1985-1995), Majalah Suara 'Aisyiyah (1995-sekarang) dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi. Karir di